PEMANFAATAN PORTAL SATU DATA LOMBOK TENGAH UNTUK MENDUKUNG EVIDENCE-BASED POLICY MAKING PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Widiya Yuska
NPP. 33.0585
Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan
Email: diyayuska12@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Ikhbaluddin, S.Kom, M.Si
Email: ikhbaluddin@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Research Gap): *Digital transformation in local government requires accurate, up-to-date, integrated, and accessible data as a basis for public decision-making. The Government of Central Lombok Regency has developed the One Data Portal, yet its utilization still faces uneven data updates, inconsistent metadata, limited system integration, and unequal apparatus capacity.* ***Purpose:*** *This study aims to describe the utilization of the Central Lombok One Data Portal in supporting evidence-based policy making at the Department of Communication and Informatics of Central Lombok Regency.* ***Method:*** *This study used a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation. Informants were selected purposively based on their relevance to the management and utilization of the portal. Data were analyzed through data reduction, data display, conclusion drawing, verification, and triangulation.* ***Result:*** *The findings show that the portal has been used as a supporting source of information for planning, program evaluation, and policy consideration. However, it has not fully become the main reference in decision-making. Portal governance has been supported by regulation, data custodian coordination, operator guidance, and digital infrastructure, but it is still constrained by data updating consistency, metadata quality, interoperability, and data literacy.* ***Conclusion:*** *The Central Lombok One Data Portal has provided an initial foundation for data-based governance, but its utilization needs to be strengthened through periodic data updates, metadata standardization, system integration, apparatus capacity building, and consistent monitoring.*

Keywords: *Central Lombok; Data Governance; Department of Communication and Informatics; Evidence-based Policy Making; One Data Portal*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Transformasi digital pemerintahan daerah menuntut ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan mudah diakses sebagai dasar pengambilan keputusan publik. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah mengembangkan Portal Satu Data, tetapi pemanfaatannya masih menghadapi pembaruan data antarperangkat daerah yang belum merata, metadata yang belum konsisten, keterbatasan integrasi sistem, serta kemampuan aparatur yang belum seragam. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemanfaatan Portal Satu Data Lombok Tengah dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan ditentukan secara purposive berdasarkan keterkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan Portal Satu Data. Analisis data dilakukan melalui

reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, verifikasi, dan triangulasi. **Hasil/Temuan:** Temuan penelitian menunjukkan bahwa Portal Satu Data Lombok Tengah telah dimanfaatkan sebagai sumber informasi pendukung dalam perencanaan, evaluasi program, dan pertimbangan kebijakan, tetapi belum sepenuhnya menjadi rujukan utama dalam pengambilan keputusan. Tata kelola portal telah didukung regulasi, koordinasi walidata, pembinaan operator, dan infrastruktur digital. Namun, masih terdapat kendala pada konsistensi pembaruan data, kualitas metadata, interoperabilitas, dan literasi data aparatur. **Kesimpulan:** Portal Satu Data Lombok Tengah telah menjadi fondasi awal tata kelola pemerintahan berbasis data, tetapi pemanfaatannya perlu diperkuat melalui pembaruan data berkala, standardisasi metadata, integrasi sistem, peningkatan kapasitas aparatur, dan monitoring yang lebih konsisten.
Kata kunci: Diskominfo; Evidence-based Policy Making; Lombok Tengah; Portal Satu Data; Tata Kelola Data

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Transformasi digital pemerintahan daerah menempatkan data sebagai dasar penting dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan keputusan publik. Pemerintah daerah dituntut menyediakan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan mudah diakses agar kebijakan tidak hanya didasarkan pada intuisi, tetapi juga pada bukti empiris (Dawes et al., 2016). Dalam kajian open government data, keterbukaan data tidak otomatis menghasilkan manfaat apabila tidak didukung kualitas data, kemudahan pemanfaatan teknologi, serta ekosistem pengguna data yang kuat (Janssen et al., 2012).

Kehadiran portal tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data. Hingga Agustus 2025, portal resmi Satu Data Lombok Tengah telah menghimpun 650 dataset dari 62 perangkat daerah, dengan 829 resources dan 67 publikasi. Data tersebut mencakup sektor strategis seperti kesehatan, kependudukan, pendidikan, ekonomi, dan infrastruktur. Namun, jumlah dataset yang besar belum otomatis menunjukkan bahwa data tersebut telah dimanfaatkan secara optimal dalam proses kebijakan.

Permasalahan utama yang melatarbelakangi penelitian ini adalah belum meratanya pembaruan data antarperangkat daerah, belum konsistennya metadata, keterbatasan integrasi sistem, serta kemampuan aparatur yang belum seragam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan portal digital belum cukup apabila pemanfaatan data belum masuk ke dalam proses kebijakan secara konsisten. Temuan ini sejalan dengan kajian *evidence-informed policy making* yang menekankan pentingnya kapasitas organisasi, kualitas analisis, dan penggunaan bukti dalam pengambilan keputusan publik (Head, 2016).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Kesenjangan masalah dalam penelitian ini terletak pada belum banyaknya kajian yang secara khusus menempatkan Portal Satu Data daerah sebagai instrumen pendukung *evidence-based policy making* pada tingkat kabupaten. Sebagian penelitian *open government* data masih lebih banyak membahas penyediaan data, transparansi, dan penggunaan teknologi, sedangkan hubungan antara pemanfaatan portal data dengan perencanaan, evaluasi, dan pertimbangan kebijakan masih perlu dikaji lebih mendalam (Safarov et al., 2017).

Secara empiris, Portal Satu Data Lombok Tengah juga masih menunjukkan ketimpangan publikasi data antarperangkat daerah. Sebagian perangkat daerah sudah aktif memperbarui data, sedangkan sebagian lainnya masih sangat terbatas bahkan belum memiliki publikasi data pada

tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara keberadaan portal sebagai infrastruktur digital dan pemanfaatannya sebagai sumber bukti kebijakan.

No	Nama Perangkat Daerah	Jumlah Data	Tahun
1	Sekretariat Daerah	0	–
2	Dinas Pemuda dan Olahraga	0	–
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	0	–
4	Inspektorat	9	–
5	Dinas Pendidikan	1	2020
6	Dinas Sosial	1	2020
7	Dinas Pariwisata dan Budaya	5	2020
8	Badan Pendapatan Daerah	5	2023
9	Dinas Pertanian	7	2023
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7	2023
11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10	2023
12	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	10	2023
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	20	2023
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	24	2023
15	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2	2024
16	Dinas Perpustakaan dan Arsip	5	2024
17	Dinas Ketahanan Pangan	5	2024
18	Dinas Lingkungan Hidup	5	2024
19	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8	2024
20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12	2024
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	22	2024
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	26	2024
23	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	48	2024
24	DP3A-P2KB	132	2024
25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1	2025
26	Dinas Koperasi dan UKM	5	2025
27	Dinas Komunikasi dan Informatika	6	2025
28	Dinas Perhubungan	9	2025
29	Satuan Polisi Pamong Praja	10	2025
30	Dinas Kesehatan	108	2025

Sumber: Satu Data Lombok Tengah, diolah lebih lanjut oleh peneliti, 2025.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena kualitas kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan pemanfaatan data yang valid. Jika Portal Satu Data hanya menjadi tempat unggah dataset tanpa digunakan secara aktif dalam perencanaan dan evaluasi, maka kebijakan daerah berisiko tetap disusun berdasarkan kebiasaan administratif, intuisi, atau data yang tersebar di masing-masing perangkat daerah. Penelitian ini memberikan dasar empiris bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk memperkuat pengelolaan portal, meningkatkan literasi data aparatur, dan menjadikan data sebagai dasar kerja birokrasi yang lebih akuntabel.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang membahas Satu Data Indonesia, *open government data*, tata kelola data, *e-government*, dan *evidence-based policy making.* Pada literatur internasional bereputasi, menunjukkan bahwa manfaat *open data* sering terhambat oleh kualitas data, kemampuan pengguna, dan kesiapan organisasi (Janssen et al., 2012). Penerimaan teknologi open data dipengaruhi oleh ekspektasi manfaat, kemudahan penggunaan, pengaruh sosial, dan kondisi pendukung (Zuiderwijk et al., 2015). Program *open government data* perlu dirancang sebagai ekosistem yang melibatkan kebijakan, produsen data, pengguna, dan mekanisme umpan balik (Dawes et al., 2016). Tidak sedikit studi *open government data* masih menekankan penyediaan data, sementara pemanfaatan data dan dampaknya belum selalu diuji secara empiris (Safarov et al., 2017). Pengambilan kebijakan berbasis bukti membutuhkan kualitas analisis, kapasitas lembaga, dan proses pemanfaatan bukti yang jelas (Head, 2016).

Penelitian dari dosen dan civitas akademika IPDN juga menjadi rujukan penting. (Ikhbaluddin, 2020) menemukan bahwa penerapan teknologi informasi pemerintahan masih menghadapi kendala regulasi, integrasi aplikasi, interoperabilitas, dan kompetensi sumber daya manusia. (Ikhbaluddin & Kawuryan, 2022) menunjukkan bahwa website pemerintah dapat mendukung komunikasi pemerintahan, tetapi pembaruan informasi, kewenangan pengelolaan, dan pemeliharaan website masih perlu diperkuat. (Riswati, 2021) menegaskan bahwa digitalisasi tata kelola pemerintahan daerah dapat mendukung good governance, tetapi belum semua daerah mampu menjalankannya karena keterbatasan sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan jaringan internet. Integrasi data kepegawaian dapat membantu penyatuan informasi dan pengambilan keputusan manajemen kepegawaian, meskipun masih terdapat keterbatasan SDM pelaksana (Setiawan et al., 2023). Kematangan digital Diskominfo dipengaruhi oleh kemampuan organisasi untuk berkolaborasi secara internal dan eksternal dalam proses transformasi digital (Syuhada et al., 2024).

Pada level nasional, beberapa penelitian mengenai Satu Data dan *open government data* menunjukkan pola yang sejalan. Keberhasilan implementasi Satu Data Indonesia dipengaruhi oleh kualitas data, interoperabilitas sistem, kapasitas SDM, organisasi, dan koordinasi antaraktor (Islami, 2021). Pentingnya pelaksanaan Satu Data Indonesia dalam memperkuat tata kelola data daerah (Riwukore et al., 2021). Kebijakan Satu Data Indonesia perlu didukung oleh keterbukaan informasi publik dan tata kelola data yang konsisten (Adinegoro et al., 2025).

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai Satu Data, e-government, open data, dan EBPM sudah berkembang, tetapi masih terbatas penelitian yang secara khusus membahas pemanfaatan Portal Satu Data Lombok Tengah sebagai pendukung evidence-based policy making pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kesenjangan dengan melihat portal data tidak hanya sebagai media publikasi, tetapi juga sebagai instrumen tata kelola data untuk perencanaan, evaluasi, dan pertimbangan kebijakan.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena tidak hanya membahas implementasi Satu Data Indonesia, keterbukaan informasi publik, atau tata kelola data secara umum. Penelitian ini secara khusus mengkaji pemanfaatan Portal Satu Data Lombok Tengah sebagai instrumen pendukung evidence-based policy making pada tingkat pemerintah kabupaten. Letak kebaruannya terdapat pada objek penelitian, yaitu Portal Satu Data Lombok Tengah; lokasi penelitian, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah sebagai walidata daerah; serta fokus penelitian, yaitu hubungan antara ketersediaan data, pemanfaatan bukti,

kapasitas kelembagaan, dan konteks organisasi dalam mendukung kebijakan berbasis bukti. Kebaruan ini memperluas kajian open government data yang sebelumnya banyak berfokus pada transparansi dan penyediaan data (Safarov et al., 2017).

Perbedaan lainnya terletak pada cara penelitian membaca portal data. Portal tidak hanya dipahami sebagai aplikasi digital atau media publikasi data, tetapi sebagai instrumen tata kelola pemerintahan yang seharusnya mendukung perencanaan, evaluasi program, dan pengambilan keputusan berbasis bukti. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi pada kajian e-government, open data, tata kelola data, dan evidence-based policy making di tingkat pemerintah daerah.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemanfaatan Portal Satu Data Lombok Tengah dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam proses pemanfaatan Portal Satu Data Lombok Tengah, tata kelola portal, dan kondisi yang memengaruhi penggunaan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Fenomena tersebut tidak cukup dijelaskan dengan angka, tetapi membutuhkan uraian mengenai pengalaman, proses kerja, persepsi informan, dan dokumen pendukung (Creswell, 2018). Pendekatan kualitatif deskriptif sesuai untuk menggambarkan kondisi faktual di lapangan secara sistematis dan kontekstual (Sugiyono, 2019).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi dari pihak yang memahami pengelolaan dan pemanfaatan portal. Observasi dilakukan untuk melihat tampilan, fitur, dan proses pemanfaatan Portal Satu Data Lombok Tengah. Dokumentasi digunakan untuk menelaah regulasi, LKjIP, dokumen SPBE, SK operator data, SOP pengelolaan data, data publikasi portal, serta dokumen pendukung lain yang relevan.

Informan ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap paling memahami pengelolaan dan pemanfaatan Portal Satu Data Lombok Tengah. Informan terdiri dari tiga kelompok. Pertama, pembuat kebijakan, yaitu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah serta Sekretaris Dinas atau pejabat eselon III. Kedua, pelaksana kebijakan, yaitu Kepala Bidang Statistik dan Persandian Diskominfo Lombok Tengah, pengelola atau admin portal, dan staf teknis integrasi data. Ketiga, stakeholders atau pengguna data, yaitu perwakilan Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta analis kebijakan atau staf perencana. Dengan demikian, jumlah informan penelitian ini adalah 11 orang.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari pembuat kebijakan, pelaksana teknis, dan perangkat daerah pengguna atau produsen data. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti juga melakukan verifikasi temuan agar data yang digunakan benar-benar menggambarkan kondisi lapangan.

Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Data yang diperoleh dikelompokkan berdasarkan dimensi evidence-based policy making, yaitu ketersediaan bukti, pemanfaatan bukti, kapasitas kelembagaan, serta konteks politik dan organisasi. Penelitian dilaksanakan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok

Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan lokasi kantor di Jl. Gajah Mada No. 1, Praya. Pelaksanaan penelitian mengikuti jadwal penelitian dan penyusunan skripsi tahun akademik 2025/2026.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis pemanfaatan Portal Satu Data Lombok Tengah menggunakan teori evidence-based policy making dari Nutley, Walter, dan Davies serta diperkuat oleh pandangan Head pada penelitiannya (Head, 2016). Teori ini digunakan karena mampu menjelaskan hubungan antara ketersediaan bukti, pemanfaatan bukti, kapasitas kelembagaan, dan konteks politik-organisasi dalam pengambilan keputusan publik. Adapun ringkasan temuan berdasarkan dimensi penelitian dapat dilihat pada tabel berikut.

Dimensi EBPM	Indikator	Temuan Utama
Ketersediaan bukti	Kualitas data, aksesibilitas data, integrasi sistem data	Data telah tersedia dan dapat diakses, tetapi pembaruan data, metadata, dan integrasi sistem belum merata.
Pemanfaatan bukti	Penggunaan data dalam perencanaan, evaluasi, dan kebijakan	Data portal sudah dipakai sebagai informasi pendukung, tetapi belum menjadi rujukan utama dalam keputusan.
Kapasitas kelembagaan	Kapasitas SDM, struktur, teknologi, dan infrastruktur	Diskominfo berperan sebagai walidata dan telah melakukan pembinaan, tetapi literasi data aparatur masih belum seragam.
Konteks politik dan organisasi	Komitmen pimpinan, koordinasi, regulasi	Regulasi dan dukungan pimpinan sudah tersedia, tetapi ego sektoral dan monitoring belum sepenuhnya konsisten.

Sumber: Hasil penelitian penulis, 2026.

3.1. Ketersediaan Bukti

Ketersediaan bukti dalam penelitian ini dilihat dari kualitas data, aksesibilitas data, dan integrasi sistem data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Portal Satu Data Lombok Tengah telah menyediakan dataset sektoral yang dapat diakses oleh publik dan perangkat daerah. Namun, keberadaan data terbuka belum cukup apabila data belum mutakhir, belum lengkap, dan belum mudah digunakan. Hal ini sejalan dengan temuan Janssen et al. (2012), Dawes et al. (2016), dan Safarov et al. (2017) bahwa kualitas data, kesiapan ekosistem, serta pemanfaatan data menjadi faktor penting dalam keberhasilan open government data.

Meskipun demikian, kualitas data belum sepenuhnya merata antarperangkat daerah. Sebagian perangkat daerah telah aktif memperbarui dataset, seperti Dinas Kesehatan yang memiliki 108 data pada tahun 2025, sedangkan beberapa perangkat daerah lain belum memiliki publikasi data pada tahun yang sama. Dalam data terbaru tahun 2026, beberapa perangkat daerah mulai menunjukkan peningkatan, seperti Sekretariat Daerah menjadi 2 dataset, Dinas Pemuda dan Olahraga menjadi 1 dataset, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi 4 dataset. Namun, tingkat kontribusi data antarperangkat daerah tetap belum seimbang.

Pada indikator integrasi sistem data, portal belum sepenuhnya terhubung secara otomatis dengan sistem informasi masing-masing perangkat daerah. Sebagian data masih dikelola secara terpisah, sehingga proses berbagi pakai data dan interoperabilitas belum optimal. Temuan ini sejalan dengan Ikhbaluddin (2020) dan Setiawan et al. (2023) yang menegaskan bahwa integrasi

sistem, interoperabilitas, dan kapasitas aparatur menjadi tantangan penting dalam penerapan teknologi informasi pemerintahan.

3.2. Pemanfaatan Bukti

Pada dimensi pemanfaatan bukti, hasil penelitian menunjukkan bahwa Portal Satu Data Lombok Tengah sudah digunakan sebagai sumber informasi pendukung dalam proses perencanaan, evaluasi program, dan pertimbangan kebijakan. Data dari portal membantu perangkat daerah memperoleh gambaran awal mengenai kondisi sektoral tanpa harus memulai pencarian data dari awal. Hal ini menunjukkan bahwa portal telah memiliki fungsi awal sebagai sumber bukti dalam proses pemerintahan.

Namun, pemanfaatan bukti belum sepenuhnya menjadi prosedur wajib dalam pengambilan keputusan. Data portal masih lebih banyak digunakan sebagai referensi atau pelengkap administrasi, bukan sebagai rujukan utama yang mengikat dalam proses penyusunan kebijakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan portal masih berada pada tahap berkembang. Portal sudah membantu penyediaan informasi, tetapi budaya pengambilan keputusan berbasis data belum sepenuhnya melembaga.

3.3. Kapasitas Kelembagaan

Pada dimensi kapasitas kelembagaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Diskominfo Kabupaten Lombok Tengah telah menjalankan peran sebagai walidata daerah. Peran tersebut tampak melalui koordinasi, pembinaan operator, pemeriksaan data, dan pengelolaan portal. Namun, kapasitas aparatur dalam analisis data masih belum merata. Kondisi ini memperkuat temuan bahwa transformasi digital pemerintahan membutuhkan kesiapan SDM, infrastruktur, kolaborasi internal-eksternal, serta peningkatan kematangan digital organisasi (Syuhada et al., 2024).

Data tersebut menunjukkan bahwa Diskominfo memiliki sumber daya kelembagaan dasar untuk menjalankan fungsi pengelolaan data. Namun, kemampuan aparatur dalam pengelolaan, validasi, pembaruan, dan analisis data belum sepenuhnya merata. Beberapa operator masih memerlukan pendampingan teknis, terutama dalam penyusunan metadata, validasi dataset, dan pemanfaatan data untuk analisis kebijakan. Oleh karena itu, kapasitas aparatur menjadi aspek penting yang perlu terus diperkuat.

Dukungan teknologi dan infrastruktur juga sudah tersedia. Data penelitian menunjukkan bahwa nilai total aset Diskominfo mencapai Rp8.516.173.340,43, dengan aset terbesar berupa peralatan dan mesin sebesar Rp6.218.129.090,43. Selain itu, terdapat 32 website perangkat daerah yang telah terintegrasi dalam satu infrastruktur server Diskominfo. Meski demikian, masih terdapat kebutuhan peningkatan kapasitas server, penyimpanan, bandwidth, keamanan sistem, dan pemeliharaan perangkat keras.

3.4. Konteks Politik dan Organisasi

Pada dimensi konteks politik dan organisasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Portal Satu Data Lombok Tengah telah didukung oleh regulasi dan komitmen pimpinan. Dukungan tersebut terlihat dari keberadaan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satu Data Lombok Tengah, koordinasi walidata, dan pembinaan operator data. Namun, budaya kerja berbasis data belum sepenuhnya kuat. Hal ini sejalan dengan Ikhbaluddin dan Kawuryan (2022) bahwa pengelolaan media digital pemerintah perlu didukung pembaruan informasi, kewenangan pengelolaan, dan pemeliharaan sistem secara berkelanjutan.

Dukungan regulasi tersebut menjadi modal penting bagi penguatan tata kelola data daerah. Akan tetapi, dukungan regulasi belum sepenuhnya berubah menjadi budaya kerja birokrasi berbasis

data. Koordinasi antarperangkat daerah sudah dilakukan, tetapi tindak lanjut pembaruan dan validasi data belum selalu konsisten. Masih terdapat ego sektoral, fragmentasi data, dan perbedaan standar pengelolaan data antarperangkat daerah. Hal ini menjadi tantangan utama dalam menjadikan portal sebagai dasar evidence-based policy making.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Islami (2021), Riwukore et al. (2021), serta Nuryana dan Junaidi (2025) yang menunjukkan bahwa implementasi Satu Data memerlukan kualitas data, koordinasi, SDM, dan infrastruktur yang memadai. Temuan ini juga memperkuat studi Janssen et al. (2012), Dawes et al. (2016), dan Safarov et al. (2017) bahwa open data membutuhkan kualitas data, ekosistem pendukung, serta pemanfaatan nyata agar tidak berhenti sebagai publikasi data.

Temuan ini juga memperkuat penelitian Islami (2021) yang menegaskan bahwa keberhasilan Satu Data Indonesia dipengaruhi oleh kualitas data, interoperabilitas, kapasitas SDM, organisasi, dan koordinasi antaraktor. Dalam konteks IPDN, temuan ini sejalan dengan Ikhbaluddin (2020), Setiawan et al. (2023), dan Syuhada et al. (2024) yang sama-sama menekankan pentingnya integrasi sistem, kompetensi aparatur, dan kematangan digital organisasi dalam tata kelola pemerintahan berbasis teknologi.

Penelitian ini juga menemukan bahwa keterbukaan data tidak cukup hanya dengan menyediakan media digital. Monitoring yang konsisten, literasi data aparatur, dan komitmen organisasi tetap diperlukan agar portal dapat digunakan sebagai dasar perencanaan, evaluasi, dan pertimbangan kebijakan. Temuan ini sejalan dengan Head (2016) bahwa bukti baru dapat memengaruhi kebijakan apabila didukung kapasitas analisis dan proses kelembagaan yang jelas.

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Temuan menarik lainnya adalah bahwa Portal Satu Data Lombok Tengah memiliki peluang besar untuk menjadi instrumen utama pengambilan keputusan berbasis bukti, tetapi fungsi tersebut belum sepenuhnya optimal. Hambatan utama yang ditemukan meliputi pembaruan data yang belum konsisten, metadata yang belum seragam, integrasi sistem yang belum optimal, literasi data aparatur yang belum merata, dan monitoring yang belum konsisten.

Di sisi lain, peluang penguatan portal cukup besar karena telah tersedia regulasi daerah, komitmen pimpinan, forum koordinasi, operator data, dan infrastruktur portal. Upaya yang sudah dilakukan meliputi koordinasi walidata, pembinaan operator, pemeriksaan data, dan pengelolaan portal oleh Diskominfo. Temuan ini penting untuk ditindaklanjuti karena portal seharusnya tidak hanya menjadi tempat publikasi data, tetapi juga menjadi dasar utama dalam perencanaan, evaluasi, dan pengambilan keputusan daerah.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Portal Satu Data Lombok Tengah telah dimanfaatkan sebagai sumber informasi awal dalam perencanaan, evaluasi program, dan pertimbangan kebijakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah. Namun, portal belum sepenuhnya menjadi rujukan utama dalam pengambilan keputusan berbasis bukti karena pemanfaatannya masih bersifat referensial dan administratif. Tata kelola portal telah didukung regulasi, koordinasi walidata, pembinaan operator, pemeriksaan data, dan infrastruktur digital, tetapi masih perlu diperkuat pada aspek pembaruan data, metadata, interoperabilitas, literasi data, dan monitoring.

Saran penelitian ini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah perlu memperkuat jadwal pembaruan dataset, menerapkan standar metadata minimum, melakukan

pemeriksaan kualitas data, dan memantau kepatuhan unggah data secara berkala. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah juga perlu menetapkan mekanisme yang mewajibkan penggunaan data portal dalam dokumen perencanaan, evaluasi, dan pertimbangan kebijakan. Perangkat daerah sebagai produsen data perlu meningkatkan kapasitas operator melalui bimbingan teknis, klinik data, serta pendampingan penyusunan metadata dan validasi data.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada fokus lokus penelitian yang hanya berada pada Portal Satu Data Lombok Tengah dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah. Hasil penelitian belum dapat digeneralisasi untuk seluruh daerah karena setiap daerah memiliki tingkat kesiapan regulasi, infrastruktur, SDM, dan budaya data yang berbeda. Selain itu, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, sehingga penelitian ini belum mengukur intensitas pemanfaatan portal secara kuantitatif.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penelitian selanjutnya dapat memperluas lokus pada perangkat daerah pengguna data, seperti Bappeda dan perangkat daerah sektoral, atau membandingkan beberapa daerah yang memiliki portal Satu Data. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan metode campuran untuk mengukur tingkat pemanfaatan portal secara lebih terukur dan membandingkannya dengan temuan kualitatif di lapangan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah serta perangkat daerah terkait yang telah memberikan kesempatan dan dukungan kepada penulis dalam pelaksanaan penelitian. Terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing, seluruh civitas akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri, keluarga, dan semua pihak yang telah membantu proses penyusunan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Adinegoro, B., Ruhuputy, M. F. A., Pambudi, I., & Arrahman, T. (2025). Kebijakan Satu Data Indonesia: Sebuah Antitesis Semangat Keterbukaan dan Informasi Publik. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, *16*(01), 1–11. https://doi.org/10.23969/kebijakan.v16i01.21869

Creswell, J. W. C. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications, Inc.

Dawes, S. S., Vidiasova, L., & Parkhimovich, O. (2016). Planning and designing open government data programs: An ecosystem approach. *Government Information Quarterly*, *33*(1), 15–27. https://doi.org/10.1016/j.giq.2016.01.003

Head, B. W. (2016). Toward more evidence-informed policy making? *Public Administration Review*, *76*(3), 472–484. https://doi.org/10.1111/puar.12475

Ikhbaluddin, I. (2020). Strategi Pemerintah Kota Tasikmalaya Dalam Menerapkan Teknologi Informasi Pemerintahan Untuk Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan. *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan*, *2*(2), 41–57. https://doi.org/10.33701/jtkp.v2i2.2316

Ikhbaluddin, I., & Kawuryan, M. W. (2022). Information technology development (website) in supporting government communication in Depok City, West Java Province. *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan*, *4*(1), 50–76. https://doi.org/10.33701/jtkp.v4i1.2699

Islami, M. J. (2021). Implementasi Satu Data Indonesia: Tantangan dan Critical Success Factors (CSFs). *Komunika: Jurnal Komunikasi Dan Informatika*, *10(1)*, 45–56.

https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/komunika/article/download/3750/1566

Janssen, M., Charalabidis, Y., & Zuiderwijk, A. (2012). Benefits, adoption barriers and myths of open data and open government. *Information Systems Management*, *29*(4), 258–268. https://doi.org/10.1080/10580530.2012.716740

Riswati, R. (2021). Implementasi tata kelola pemerintahan daerah berbasis digitalisasi teknologi di Indonesia. *Jurnal Media Birokrasi*, *3*(2). https://doi.org/10.33701/jmb.v3i2.2474

Riwukore, J. R., Marnisah, L., Habaora, F., & Yustini, T. (2021). Implementation of One Indonesian Data by the Central Statistics Agency of East Nusa Tenggara Province. *Jurnal Studi Ilmu Sosial Dan Politik*, *1*(2), 117–128. https://doi.org/10.35912/jasispol.v1i2.1194

Safarov, I., Meijer, A., & Grimmelikhuijsen, S. (2017). Utilization of open government data: A systematic literature review of types, conditions, effects and users. *Information Polity*, *22*(1), 1–24. https://doi.org/10.3233/IP-160012

Setiawan, I., Aditia, R., & Hidayat, M. R. R. (2023). Penerapan integrasi data pegawai negeri sipil di Pemerintah Kota Padang. *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan*, *5*(1), 41–61. https://doi.org/10.33701/jtkp.v5i1.3416

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung.

Syuhada, M. H., Basnella, R., & Zahraty, W. (2024). Analisis kematangan digital Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam menggunakan Digital Maturity Model 5.0. *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan*, *6*(1), 125–146. https://doi.org/10.33701/jtkp.v6i1.4475

Zuiderwijk, A., Janssen, M., & Dwivedi, Y. K. (2015). Acceptance and use predictors of open data technologies: Drawing upon the unified theory of acceptance and use of technology. *Government Information Quarterly*, *32*(4), 429–440. https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.09.005